

Pandangan Siswa SMA terhadap Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer

Darnifan Kristin Gulo¹, F. Agnes Marinda¹, Andre Sebastian Siahaan¹, Valentine Marcelyna¹, Estrella Rachellita Frenly¹, Nicholas Alexander Djafar¹
Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
221008116@students.uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Gulo, D. K., Marinda, F. A., Siahaan, A. S., Marcelyna, V., Frenly, E. R., Djafar, N. A. (2026). Pandangan Siswa SMA terhadap Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, Vol. 12(1), 81-98.

ABSTRAK

Kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Penelitian ini bertujuan menggali pandangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pihak yang paling terdampak langsung, khususnya mengenai definisi anak bermasalah, efektivitas pendekatan militer, serta pihak yang paling bertanggung jawab atas pembinaan karakter remaja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga belas siswa SMA/SMK dari berbagai daerah di Indonesia, dianalisis melalui konsep sosialisasi represif dan partisipatif serta fungsi komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan pandangan siswa yang terbelah: sebagian mendukung barak militer sebagai sarana penanaman disiplin dan efek jera, sementara sebagian lain mengkhawatirkan risiko trauma psikologis dan lebih menekankan pendekatan konseling. Mayoritas informan sepakat bahwa barak militer bukan solusi tuntas karena tidak menyentuh akar masalah, serta menegaskan bahwa orang tua dan keluarga tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak.

Kata Kunci: Barak Militer; Kenakalan Remaja; Komunikasi Politik; Siswa Sekolah Menengah Atas; Sosialisasi Politik.

ABSTRACT

The policy of sending troubled students to military-style barracks, initiated by the Governor of West Java, has generated considerable public debate. This study aims to explore the perspectives of senior high school students, as the group most directly affected by the policy, particularly regarding how they define a “troubled child,” how they assess the effectiveness of the military approach, and who they consider most responsible for adolescent character development. Employing a qualitative approach, this study used in-depth interviews with thirteen senior high school and vocational school students from various regions in Indonesia. Data were analyzed through the concepts of repressive and participatory socialization, as well as the functions of political communication. The findings reveal divided student opinions: some support the barracks program as a means of instilling discipline and deterrence, while others express concern over the risk of psychological trauma and favor counseling-based approaches instead. Most informants agree that the military barracks program does not constitute a comprehensive solution, as it fails to address the root causes of delinquency, and they emphasize that parents and family remain the parties most responsible for shaping adolescent character. These findings suggest that effective adolescent socialization requires a balance between discipline and the cultivation of critical, participatory citizenship, supported by collaboration among family, school, and government.

Keywords: Juvenile Delinquency; Military Barracks; Political Communication; Political Socialization; Senior High School Students.

PENDAHULUAN

Masalah kenakalan remaja di tingkat sekolah menengah atas (SMA) masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berbagai bentuk perilaku negatif seperti tawuran, pelanggaran aturan sekolah, hingga tindakan menyimpang lainnya sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, pendidik, serta pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, sejumlah kebijakan baru mulai diterapkan, salah satunya adalah program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Saat barak jadi sekolah, strategi Pemprov Jabar bentuk karakter remaja

Oleh Anita Permata Dewi | Rabu, 21 Mei 2025 05:17 WIB | waktu baca 5 menit



Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar

Gambar 1. Barak militer menjadi Sekolah untuk membentuk karakter remaja.

Sumber: www.antaranews.com, 2025

Program tersebut bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan disiplin, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada siswa yang sulit dibina melalui metode pelatihan ala militer. Anak-anak yang mengikuti program ini diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak percaya bahwa pendekatan militer dapat menjadi solusi cepat untuk mengatasi kenakalan remaja yang tidak dapat ditangani oleh sekolah atau keluarga. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak psikologis, risiko kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran hak anak, terutama jika pelaksanaannya tidak melibatkan penilaian psikologis yang memadai dan hanya didasarkan pada persetujuan guru atau orang tua.



Gambar 2. Kritik dari Pemerintah
Sumber: www.regional.kompas.com, 2025

Para ahli pendidikan dan lembaga perlindungan anak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menilai bahwa pengiriman siswa bermasalah ke barak militer bukanlah solusi komprehensif untuk mengatasi kenakalan remaja. Mereka berpendapat bahwa perilaku menyimpang pada remaja biasanya berakar pada masalah mendasar seperti kurangnya perhatian dari orang tua, tekanan ekonomi dalam keluarga, serta lingkungan sosial yang kurang kondusif bagi perkembangan anak. Pendekatan militer yang lebih menekankan pada kedisiplinan dan ketertiban dianggap hanya menangani gejala luar tanpa mampu membangun kesadaran moral atau empati yang mendalam dalam diri siswa.

Selain itu, ada kekhawatiran terhadap dampak psikologis dan sosial akibat pelabelan “anak nakal” bagi remaja yang dikirim ke barak militer. Label tersebut berpotensi memperkuat stigma negatif, menciptakan jarak sosial antara siswa dengan lingkungan sekolah, serta menurunkan rasa percaya diri mereka. Pendekatan ini juga dapat menimbulkan persepsi bahwa sekolah tidak lagi menjadi tempat utama untuk

membina karakter siswa, melainkan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada institusi lain seperti militer. Jika kondisi ini terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap peran pendidikan formal dalam membentuk kepribadian dan moral remaja bisa menurun. Oleh karena itu, para pakar merekomendasikan penggunaan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi, seperti layanan konseling, penguatan peran keluarga, pendidikan karakter yang berkelanjutan, serta pendampingan oleh guru sebagai pendidik dan teladan bagi siswa.

Pengiriman Siswa ke Barak Tentara Harus Dikaji agar tak Bertentangan dengan Hak Anak

Devi Harahap

06/5/2025 15:43

A- A+



Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis saat melakukan penyalaman bangunan yang diduga merusak lingkungan di Eiger Adventure Land, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. (Antara Foto)

Gambar 3. Pendapat Siswa

Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/768244/pengiriman-siswa-ke-barak-tentara-harus-dikaji-agar-tak-bertentangan-dengan-hak-anak>

Dalam konteks kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer, berbagai pendapat dan reaksi muncul dari kalangan pemerintah, orang tua, pakar pendidikan, dan masyarakat luas. Namun, salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian adalah bagaimana sebenarnya siswa SMA sebagai pihak yang paling terlibat dan terdampak langsung memaknai dan merespons kebijakan tersebut. Siswa SMA merupakan subjek utama dalam sistem pendidikan dan juga kelompok yang paling dekat dengan fenomena kenakalan remaja. Oleh karena itu, memahami

persepsi mereka terhadap program barak militer sangat penting untuk beberapa alasan berikut:

1. Efektivitas Program

Pandangan siswa dapat memberikan gambaran nyata tentang apakah pendekatan pembinaan melalui barak militer benar-benar efektif dalam mengubah perilaku dan membentuk karakter mereka. Apakah mereka merasa program tersebut membantu mereka menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, atau justru menimbulkan tekanan dan rasa tidak nyaman yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

2. Penerimaan dan Dukungan

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada tingkat penerimaan dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Jika siswa menolak atau merasa tertekan dengan program ini, maka efektivitasnya akan berkurang. Sebaliknya, jika mereka memahami dan mendukung tujuan program, maka proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

3. Dampak Sosial dan Psikologis

Pandangan siswa juga penting untuk mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul, seperti perasaan terstigma, rendah diri, atau isolasi sosial akibat pelabelan sebagai “anak bermasalah.” Hal ini membantu pihak pembuat kebijakan untuk menyesuaikan pendekatan agar lebih manusiawi dan tidak menimbulkan efek negatif jangka panjang.

4. Masukan untuk Pengembangan Kebijakan

Dengan mendengarkan suara siswa, pembuat kebijakan dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk memperbaiki atau mengembangkan metode pembinaan karakter yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Ini termasuk alternatif pendekatan yang lebih holistik, seperti konseling, penguatan peran keluarga, dan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

5. Mendorong Partisipasi Aktif Siswa

Melibatkan siswa dalam evaluasi dan pengembangan program pembinaan juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap proses pendidikan karakter. Hal ini penting untuk membangun budaya sekolah yang inklusif dan suportif.

Dengan demikian, penelitian yang mengkaji pandangan siswa SMA secara luas dan mendalam sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pengiriman anak

bermasalah ke barak militer tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi siswa akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, manusiawi, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

METODE

Tabel 1 : Profil Narasumber Siswa SMA

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Lokasi Wawancara
Latricia Vienna	Perempuan	17 Tahun	SMA Trinitas Bandung	Online, video call WhatsApp
Gabriella Allena Hartono	Perempuan	17 Tahun	SMA Trinitas Bandung	Online, video call WhatsApp
Elvin	Laki-laki	18 Tahun	SMK Negeri 3 Merauke	Online, video call WhatsApp
Fatimah	Perempuan	18 Tahun	SMK Negeri 3 Merauke	Online, video call WhatsApp
Hilda	Peempuan	17 Tahun	SMA Negeri 3 Mandrehe	Online, video call WhatsApp
Rinto	Laki-laki	17 Tahun	SMA Negeri 3 Mandrehe	Online, video call WhatsApp
Erlangga	Laki-laki	17 Tahun	SMA Stella Duce 2	Offline wawancara
Lia	Perempuan	16 Tahun	SMA Negeri 2 Surakarta	Offline wawancara
Raymond Chou	Laki-laki	17 Tahun	SMK Paramita Maitreya	Online, video call WhatsApp

Erika	Peempuan	17 Tahun	SMAS Cendana Mandau	Online, video call WhatsApp
Nathasya	Perempuan	17 Tahun	SMA Methodist Banda Aceh	Online, video call WhatsApp
Elijah	Laki-laki		SMA Methodist Banda Aceh	Online, video call WhatsApp

TEMUAN & PEMBAHASAN

Temuan

Dalam rangka menggali respons siswa terhadap kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer, dilakukan wawancara dengan sejumlah pelajar dari berbagai daerah. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para siswa memahami definisi “anak bermasalah,” serta bagaimana mereka menilai efektivitas pendekatan militer dalam menangani perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Secara umum, informan memaknai “anak bermasalah” sebagai siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sekolah, keluarga, maupun masyarakat, seperti membolos, merokok, tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas. Latricia Vienna menjelaskan:

“Anak yang dianggap bermasalah adalah anak yang tidak mampu berperilaku sesuai dengan aturan, norma, etika, dan moral yang berlaku di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat... Namun demikian, penting untuk berhati-hati dalam melabeli anak-anak ini. Tidak semua anak yang berperilaku demikian adalah 'jahat' atau sepenuhnya bersalah. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut sebenarnya sedang mengalami masalah psikologis, kesulitan perilaku, atau berasal dari keluarga yang disfungsiional.”

Pandangan senada disampaikan oleh Erika, yang mengaitkan perilaku bermasalah dengan kenakalan remaja seperti tawuran, pencurian, dan vandalisme, serta menegaskan bahwa perilaku tersebut “sering kali disebabkan oleh masalah dalam keluarga atau lingkungan sosial”. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa tidak semata-

mata memandang anak bermasalah sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang berpotensi mengalami kerentanan psikososial. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan lembaga perlindungan anak yang menilai kenakalan remaja sebagai gejala dari persoalan yang lebih kompleks, bukan semata persoalan disiplin individu (Harahap, 2025). Kesadaran siswa akan kompleksitas penyebab perilaku menyimpang ini menjadi dasar penting bagi pembentukan sikap mereka terhadap tepat atau tidaknya pendekatan militer diterapkan.

Selanjutnya, pandangan informan mengenai kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian informan mendukung kebijakan tersebut karena dianggap mampu menanamkan disiplin dan memberikan efek jera terhadap anak yang sulit diarahkan. Elvin menyatakan:

“Ya perlu. Karena perilaku anak-anak yang bermasalah dengan perilakunya, tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari orang tua. Sehingga membutuhkan arahan, ketegasan, dan disiplin dari pihak militer. Contohnya anak-anak yang suka terlibat perkelahian antarsekolah.”

Di sisi lain, terdapat informan yang menyatakan kurang setuju terhadap kebijakan tersebut karena dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi setiap anak. Mereka berpandangan bahwa pendekatan militer berpotensi memberikan tekanan psikologis apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang anak.

“Pendekatan militer bisa membuat anak makin stres, apalagi jika mereka punya masalah psikologis. Tidak semua anak cocok dengan cara keras. Pendekatan seperti konseling dan kegiatan positif lebih efektif... Orang tua, sekolah, dan masyarakat tetap yang paling bertanggung jawab.”

Hilda juga menyampaikan:

"Metode militer berisiko menimbulkan trauma psikologis, terutama bag anak yang sudah mengalami kekerasan atau tekanan emosional. Pendekatan tersebut juga tidak menyentuh akar masalah, seperti konflik keluarga atau kemiskinan.

Pandangan Siswa SMA Trinitas Bandung

Menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang beragam terkait kebijakan tersebut. Sebagian siswa berpendapat bahwa anak bermasalah adalah mereka yang menunjukkan perilaku menyimpang seperti bolos sekolah, merokok, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba. Dalam pandangan mereka, barak militer menjadi solusi yang dapat menanamkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan efek jera, karena lingkungan militer yang tegas dan jauh dari kenyamanan rutinitas sehari-hari dianggap mampu mengubah perilaku anak.

Namun, mereka menekankan bahwa tidak semua kasus kenakalan remaja cocok diselesaikan dengan metode militer, karena latar belakang masalah setiap anak berbeda-beda. Pendekatan militer yang terlalu keras dikhawatirkan justru memperburuk kondisi psikologis anak yang sedang mengalami masalah emosional atau tekanan sosial. Para siswa ini lebih mendukung solusi berbasis konseling, pendekatan empatik, serta pembinaan karakter yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan individu. Mereka juga menekankan bahwa keluarga tetap menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter anak, sehingga intervensi dari luar perlu dilakukan secara hati-hati dan selektif.

Pandangan Siswa SMA Negeri 3 Mandrehe

Berdasarkan temuan dari dua narasumber, pandangan siswa SMA Negeri 3 Mandrehe terhadap kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer cenderung bersifat kritis dan lebih condong ke arah penolakan. Meskipun mereka mengakui bahwa barak militer dapat memberikan pelatihan disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama tim, mereka menilai bahwa pendekatan semacam itu tidak cocok dijadikan solusi utama. Siswa berpendapat bahwa cara militer yang terlalu keras justru dapat menimbulkan stres atau trauma, terutama bagi anak-anak yang memiliki latar belakang masalah psikologis atau keluarga yang tidak harmonis. Mereka juga menekankan bahwa tidak semua anak cocok dengan pendekatan keras dan kaku. Sebaliknya, siswa lebih percaya pada efektivitas pendekatan non-militer seperti konseling, terapi, kegiatan positif, dan pembinaan karakter secara emosional. Menurut mereka, pendidikan seharusnya bersifat membina, bukan menghukum, dan menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa tanggung jawab atas anak bermasalah tidak bisa hanya dibebankan kepada barak militer, tetapi harus menjadi tugas bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Pandangan Siswa Di Riau

Sebagian siswa di Riau memaknai anak bermasalah sebagai mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas, melanggar aturan, menjadi anak jalanan, atau terlibat dalam kelompok seperti ormas dan perilaku menyimpang lainnya. Mereka umumnya setuju dengan kebijakan pendidikan militer dalam bentuk barak, dengan alasan bahwa pendekatan yang tegas dapat menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta membentuk karakter anak melalui pelatihan fisik, etika, hingga kerjasama. Meski begitu, mereka juga menyarankan agar upaya ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Pendidikan dan pendekatan lain sebaiknya diberikan terlebih dahulu, dan jika anak tetap menunjukkan perilaku bermasalah, barulah pelatihan militer diterapkan sebagai solusi lanjutan. Beberapa siswa menilai pendekatan non militer saat ini kurang efektif karena anak-anak masa kini dianggap semakin tahu cara melawan dan menghindari hukuman. Meski dinilai cukup mampu mengurangi kenakalan remaja, pendidikan militer tetap dianggap belum menyentuh akar permasalahan seperti kurangnya kasih sayang atau perhatian dari keluarga. Maka dari itu, mereka menekankan bahwa orang tua tetap menjadi pihak utama dalam membentuk perilaku anak, karena keluarga adalah tempat anak belajar pertama kali sebelum lingkungan sekolah atau sosial berperan.

Pandangan Siswa Di Merauke Papua

Sebagian siswa di Merauke Papua menilai bahwa anak bermasalah adalah mereka yang tidak dapat bersikap atau berperilaku sesuai dengan aturan, kesopanan, dan nilai moral yang berlaku, seperti membantah orang tua, melawan guru, hingga terlibat perkelahian antar sekolah. Barak militer dianggap sebagai salah satu solusi alternatif yang dapat diterapkan, karena lingkungan militer dinilai mampu membentuk kedisiplinan, ketegasan, serta membimbing anak dalam mengatur kegiatan sehari-hari agar lebih terstruktur. Melalui kegiatan seperti bangun pagi, sarapan tepat waktu, dan latihan fisik, siswa berharap anak-anak bermasalah dapat diarahkan ke perilaku yang lebih positif. Pendekatan militer ini juga dinilai belum tentu cocok untuk semua anak. Beberapa siswa menyadari bahwa keefektifan metode ini sangat tergantung pada tingkat keparahan perilaku dan kesiapan mental anak yang dibina. Mereka juga berpendapat bahwa pihak-pihak seperti KPAI atau tenaga profesional lainnya tetap bisa berperan dalam mendampingi anak-anak bermasalah selama pendidikannya memiliki ketegasan dan disiplin. Selain itu, peran orang tua dinilai sangat penting dalam proses pembinaan, karena merekalah yang paling dekat dan memiliki tanggung

jawab utama terhadap perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, pembinaan di barak militer sebaiknya bukan menjadi satu-satunya solusi, melainkan harus disertai dengan pendekatan lain seperti konseling, pengembangan karakter, dan dukungan keluarga agar hasilnya dapat maksimal dan berkelanjutan.

Pandangan Siswa di Banda Aceh

Menurut siswa-siswi dari SMA Methodist Banda Aceh, anak-anak yang bermasalah umumnya adalah mereka yang suka bolos, berperilaku buruk, atau tidak dapat dikendalikan oleh guru, sekolah, maupun orang tua. Mereka menilai bahwa awal mula permasalahan dari kenakalan remaja sering kali berasal dari kurangnya peran keluarga dan lingkungan sekitar. Jika kedua hal itu tidak mendukung pembentukan karakter yang baik, maka anak-anak lebih mudah terpengaruh ke hal-hal negatif. Terkait wacana pendidikan ala militer bagi anak-anak bermasalah, pendapat siswa terbagi namun cenderung realistis. Mereka mengakui bahwa metode ini memang terdengar keras dan ekstrim, namun bisa menjadi solusi terakhir jika pendekatan lain tidak berhasil. Jika barak militer mampu mengubah perilaku menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, maka itu bisa dianggap sebagai pilihan yang efektif. Beberapa siswa juga menilai bahwa dibandingkan hukuman fisik seperti cambuk, pendidikan ala militer lebih mendidik dan membentuk karakter. Selain itu, siswa menyarankan bahwa sebelum mengambil langkah sejauh itu, anak-anak perlu belajar mengatur diri, seperti tidur teratur, menggunakan alarm, dan membangun kesadaran diri. Mereka percaya bahwa perbaikan karakter bisa dimulai dari rumah, dengan dukungan keluarga yang peduli dan lingkungan yang sehat.

Pandangan Siswa di Jawa (Jogja dan Solo)

Menurut siswa-siswa di Jawa menyampaikan pernyataan bahwa anak-anak yang bermasalah adalah mereka yang membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat sekitarnya dan terhadap diri mereka sendiri, seperti melawan guru atau orang tuanya yang terlibat perundungan, bullying dan juga menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sosial mereka juga terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, mencuri, vandalisme hingga konsumsi alkohol dan narkoba. Dalam beberapa kasus tertentu untuk mendidik anak bermasalah perlu perhatian khusus dan fokus pada pembinaan karakter mereka bukan yang latihan tempur dan keras agar anak-anak tersebut tidak mengalami trauma kembali, kualitas program pendidikan di dalam barak juga berpengaruh pada masalah yang terjadi dalam perilaku anak-anak tersebut, ketika

sudah keluar dari barak maka harus dibarengi dukungan dari keluarga dan lingkungan sosialnya dan harus dibina serta didampingi lebih lanjut tetapi harus bersifat sukarela bukan pemaksaan. program barak militer hanyalah untuk membuat anak mendapatkan efek jera sementara karena hal tersebut tidak sampai pada akar masalah yang ada pada anak-anak tersebut, peran orang tua dan lingkungan sosialnya yang harus ekstra bertanggung jawab dalam pola asuh, memberikan kasih sayang pada anak-anaknya karena sejak kecil orang tua mereka yang membimbing dan mengajarkan tentang nilai-nilai dasar.

Pembahasan

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang pengiriman siswa bermasalah ke barak militer menuai beragam tanggapan, khususnya dari siswa SMA yang informan untuk pembahasan topik ini. Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa definisi “anak bermasalah” menurut siswa cukup bervariasi, namun umumnya mencakup perilaku menyimpang seperti bolos, merokok, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba. Anak-anak yang sulit diatur, sering membangkang, atau melakukan kekerasan juga termasuk dalam kategori ini. Menariknya, banyak siswa menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelabelan, mengingat perilaku menyimpang sering kali merupakan manifestasi dari masalah psikologis, kesulitan pribadi, atau kekurangan kasih sayang dari keluarga. Pandangan ini sejalan dengan pandangan para ahli pendidikan dan lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan Kemen PPPA, yang menganggap kenakalan remaja sebagai gejala dari persoalan yang lebih kompleks.

Pada konteks keberhasilan program barak militer sebagai solusi, pendapat siswa terbagi. Sejumlah siswa dari Bandung dan Merauke seperti Latricia Vienna, Gabriella Allena Hartono, Elvin, dan Fatimah menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. Mereka menilai lingkungan militer yang tegas mampu menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan efek jera yang dibutuhkan oleh remaja yang tidak dapat ditangani dengan metode konvensional. Misalnya, Elvin percaya disiplin militer bisa mengarahkan energi remaja ke hal-hal positif, sementara Fatimah berharap metode ini bisa membawa perubahan perilaku yang nyata. Namun, dukungan ini umumnya disertai catatan bahwa pendekatan militer sebaiknya menjadi opsi terakhir, mengingat tidak semua kasus remaja bermasalah cocok disamaratakan.

Sebaliknya, siswa dari Mandrehe dan Banda Aceh seperti Hilda, Rinto, Nathasya, dan Elijah mengekspresikan kekhawatiran serius. Mereka merasa

pendekatan militer yang keras dapat menyebabkan trauma psikologis, terutama bagi anak-anak dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Rinto mengemukakan bahwa cara keras justru bisa membuat anak semakin stres, dan lebih memilih pendekatan seperti konseling atau kegiatan positif. Hilda menilai pendekatan militer kerap tidak menyentuh akar persoalan. Nathasya dan Elijah juga menyoroti bahwa peran keluarga dan lingkungan yang suportif jauh lebih penting dalam membentuk karakter anak. Kekhawatiran ini mencerminkan kesadaran bahwa pelabelan “nakal” dan stigma sosial justru bisa memperburuk kondisi psikologis siswa. Sebagai institusi pembinaan, barak militer menyosialisasikan nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan kepatuhan terhadap aturan. Menurut siswa seperti Latricia Vienna, pendidikan militer ideal mencakup latihan baris-berbaris (PBB), pelatihan etika, serta kegiatan akademik yang terstruktur. Rutinitas harian yang ketat seperti bangun pagi, sarapan tepat waktu, dan olahraga menjadi bagian dari pembentukan karakter yang disiplin.

Nilai-nilai yang didapatkan dalam program barak militer yaitu membentuk kepatuhan terhadap otoritas dan sistem meliputi disiplin, tanggung jawab, kepatuhan, kerjasama, ketaatan pada hukum, penghargaan terhadap otoritas, dan kesadaran sosial, dimana nilai-nilai tersebut terdapat keterkaitan yang kuat terhadap sosiologi politik. Disiplin mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap aturan, sementara tanggung jawab mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Kepatuhan dan penghargaan terhadap otoritas menekankan pentingnya menghormati keputusan pemimpin dan institusi, sedangkan kerja sama mengedepankan nilai kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, ketaatan pada hukum menanamkan pemahaman bahwa peraturan harus dihormati, dan kesadaran sosial mendorong individu untuk peduli terhadap isu-isu di sekitar mereka. Nilai tersebut sejalan dengan konsep Sosialisasi Represif, yaitu sosialisasi yang menekankan kepatuhan dan hukuman untuk membentuk individu yang taat. Namun, bila tidak diimbangi dengan pengembangan otonomi dan pemikiran kritis sebagaimana dalam Sosialisasi Partisipatif, risiko munculnya individu yang patuh secara buta namun kurang reflektif dan aktif dalam kehidupan sosial-politik menjadi besar. Oleh karena itu, pendekatan barak perlu diseimbangkan agar mampu membentuk karakter kuat tanpa menekan kebebasan berpikir dan perkembangan emosi siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMA mengenai kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer, terlihat adanya dinamika sosialisasi politik yang kompleks, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai represif dan

partisipatif. Sebagian siswa, terutama dari Riau dan Merauke Papua, menunjukkan pandangan yang mendukung pendekatan militer. Mereka memaknai “anak bermasalah” sebagai individu yang melanggar aturan, terlibat pergaulan bebas, atau tidak patuh terhadap figur otoritas. Dukungan terhadap barak militer didasarkan pada keyakinan bahwa lingkungan yang tegas dan disiplin dapat menanamkan tanggung jawab, membentuk karakter, dan memberikan efek jera. Pandangan ini sejalan dengan konsep sosialisasi represif, dimana kepatuhan dan hukuman dianggap efektif untuk mengubah perilaku. Siswa-siswi ini melihat barak militer sebagai solusi alternatif yang mampu mengarahkan energi negatif remaja ke kegiatan positif, seperti olahraga dan jadwal teratur, yang pada akhirnya dapat membangun kembali rasa hormat terhadap otoritas. Mereka bahkan berpendapat bahwa pendekatan non-militer saat ini kurang efektif karena remaja Gen Z dianggap lebih “tahu cara melawan” dan menghindari hukuman, sehingga membutuhkan didikan yang lebih keras.

Namun, disisi lain, terdapat pandangan kritis yang lebih condong ke arah penolakan, terutama dari siswa SMA Negeri 3 Mandrehe dan beberapa siswa di Jawa Barat. Mereka mengakui potensi barak militer dalam melatih disiplin, tetapi menilai bahwa pendekatan keras semacam itu tidak cocok dijadikan solusi utama. Kekhawatiran utama adalah risiko trauma psikologis, terutama bagi anak-anak dengan latar belakang masalah emosional atau keluarga yang tidak harmonis. Pandangan ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya bersifat membina, bukan menghukum, dan harus menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya, seperti kurangnya perhatian keluarga atau tekanan sosial. Mereka lebih mendukung solusi non-militer seperti konseling, terapi, kegiatan positif, dan pembinaan karakter yang manusiawi. Hal ini mencerminkan elemen sosialisasi partisipatif, di mana otonomi anak, pemahaman terhadap kebutuhan individu, dan pengembangan kesadaran moral menjadi prioritas.

Siswa-siswi dari Banda Aceh juga menunjukkan pandangan yang realistis, mengakui bahwa meskipun metode militer terdengar ekstrem, ia bisa menjadi solusi terakhir jika pendekatan lain tidak berhasil. Mereka bahkan membandingkannya dengan hukuman fisik seperti cambuk, menilai pendidikan ala militer lebih mendidik dan membentuk karakter. Namun, mereka tetap menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan yang sehat sebagai fondasi utama pembentukan karakter.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa SMA memiliki pemahaman yang beragam tentang “anak bermasalah” dan efektivitas pendekatan militer. Meskipun ada pengakuan terhadap potensi barak militer dalam menanamkan disiplin dan tanggung jawab, terdapat kekhawatiran signifikan mengenai

dampak psikologis dan kurangnya penanganan akar masalah. Ini mengindikasikan bahwa sosialisasi politik di kalangan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh penekanan pada kepatuhan (represif), tetapi juga oleh kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik, empatik, dan partisipatif yang mempertimbangkan kesejahteraan mental dan emosional siswa. Oleh karena itu, untuk mencapai sosialisasi politik yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan keseimbangan antara penanaman disiplin dan pengembangan otonomi serta pemikiran kritis, dengan melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan karakter remaja.

Kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dalam konsep komunikasi politik, di mana pemerintah berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan bahwa barak militer adalah solusi untuk mengatasi kenakalan remaja. Ini mencerminkan penerapan fungsi informasi dalam komunikasi politik, yang bertujuan untuk menyampaikan visi dan tujuan kebijakan kepada publik melalui berbagai media dan narasi keberhasilan. Selain itu, kebijakan ini juga mengandung fungsi pendidikan, di mana nilai-nilai nasionalisme dan karakter diharapkan dapat ditanamkan kepada siswa. Pendekatan ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh partai politik atau negara dalam menyebarkan ideologi kepada warganya. Namun, tanggapan siswa dan kritik dari lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa pesan ini tidak selalu diterima dengan baik. Adanya "noise" atau gangguan dalam komunikasi ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan, agar semua pihak merasa terlibat dalam proses tersebut. Fungsi instruksi juga terlihat jelas dalam kebijakan ini, di mana siswa diminta untuk mematuhi aturan barak secara ketat, mirip dengan instruksi politik yang diberikan pemimpin kepada rakyat. Namun, efektivitas dari instruksi ini sangat bergantung pada seberapa baik siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan, bukan sekadar kepatuhan yang bersifat paksa. Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan fungsi persuasi untuk meyakinkan publik bahwa pendekatan militer akan menghasilkan perubahan positif. Meskipun demikian, seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar siswa, keberhasilan persuasi ini masih terbatas, karena banyak yang meragukan dampak jangka panjang dan potensi trauma yang mungkin ditimbulkan oleh pendekatan militer.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara pandangan siswa terhadap kebijakan ini menjadi sesuatu hal yang cukup kompleks dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. Barak militer dapat berfungsi sebagai alat untuk membentuk disiplin, tetapi pendekatannya harus bijak dan kontekstual. Dalam konteks sosialisasi politik, barak militer berpotensi membentuk warga yang patuh terhadap sistem, namun hal ini harus

diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kritis dan partisipatif. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan ini perlu dikomunikasikan secara lebih inklusif dan holistik, dengan melibatkan suara siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Dengan cara ini, diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi alat penegakan disiplin, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan kepribadian yang positif bagi generasi muda.

PENUTUP

Pendidikan ala militer bagi siswa yang bermasalah mulai dianggap sebagai salah satu alternatif untuk memberantas kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Anak-anak yang susah diatur, suka bolos, memiliki sikap kasar, atau tidak mematuhi aturan sering kali tidak dapat dikendalikan hanya melalui pendekatan sekolah dan orang tua. Dalam kondisi seperti ini, barak militer hadir sebagai tempat pelatihan kedisiplinan yang bertujuan membentuk karakter, tanggung jawab, dan kemandirian siswa. Di lingkungan barak, siswa harus menjalani rutinitas yang teratur, bangun pagi, menjaga kebersihan, mengikuti jadwal latihan fisik, serta mengikuti perintah dari pelatih atau instruktur. Suasana lingkungan barak yang ketat dan penuh aturan ini membantu mereka belajar mematuhi sistem dan memperbaiki sikap mereka yang sebelumnya bermasalah. Banyak yang menilai bahwa sistem ini mampu memberikan efek positif, terutama karena pengawasan dilakukan secara konsisten dan penuh ketegasan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa anak-anak yang mengikuti pelatihan militer menjadi lebih tertib, disiplin, dan menghargai aturan, bahkan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit pula dari mereka yang merasa lebih dihargai dan dibimbing dengan sungguh-sungguh, berbeda dari lingkungan sebelumnya yang mungkin cenderung membiarkan atau menyerah menghadapi kenakalan mereka. Meskipun begitu, keberhasilan dari pendidikan ala militer tetap dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan. Jika terlalu keras tanpa memperhatikan sisi psikologis anak, bisa jadi justru menimbulkan trauma atau perlawanan batin dan fisik.

Oleh karena itu, peran pelatih yang profesional serta dukungan dari keluarga tetap dibutuhkan agar proses pembinaan berjalan optimal. Pendidikan militer tidak bisa dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pendidikan karakter alternatif yang fokus pada perbaikan perilaku dan pembentukan karakter. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dinilai lebih bermanfaat daripada hukuman fisik seperti cambuk yang ada di daerah otonomi tertentu seperti Aceh, yang hanya memberikan efek jera sesaat

tanpa menyentuh akar masalah. Dengan pengawasan yang ketat, pembinaan yang menyeluruh, dan dukungan dari orang tua serta sekolah, barak militer bisa menjadi tempat yang efektif dalam membantu siswa bermasalah kembali ke jalur yang benar dan menjadi pribadi yang lebih baik di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.antaranews.com/berita/4847425/saat-barak-jadi-sekolah-strategi-pemprov-jabar-bentuk-karakter-remaja>

<https://regional.kompas.com/read/2025/05/17/093940878/kebijakan-barak-militer-dikritik-dedi-mulyadi-saya-merasa-berdosa-jika-tak>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/768244/pengiriman-siswa-ke-barak-tentara-harus-dikaji-agar-tak-bertentangan-dengan-hak-anak>